KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT (SUATU STUDI PADA BANK TJANDRA ARTHA LESTARI BANDAR LAMPUNG)

AUTHORITY AND RESPONSIBILITY OF A NOTARY PUBLIC IN MAKING FIDUCIARY DEED OF GUARANTEE AT RURAL CREDIT BANKS (A STUDY AT TJANDRA ARTHA LESTARI BANK, BANDAR LAMPUNG)

Oddy Marsa JP

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung
weirdo2jr@gmail.com

Abstrak

Kedudukan Notaris diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 relatif terhadap Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UUNJ). Dalam melakukan kewenangannya, Notaris wajib untuk memberikan jaminan investasi serta wajib untuk memenuhi hak-hak maupun kewajiban pihak- pihak dalam kerjasama ekonomi serta hal-hal lain yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normative, yang menggunakan data sekunder sebagai data utama, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam penerbitan akta fidusia kepada bank dan konsekuensi hukumnya jika jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris tidak terdaftar di kantor pendaftaran fidusia.

Hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan bahwa seorang notaris harus sangat berhati-hati dalam melakukan segala tugas serta wewenangnya terhadap hak serta kewajiban para pihak dan dalam hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran serta tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia pada lembaga keuangan bank karena itu merupakan pertanggungjawaban secara hukum, yaitu jaminan kepastian hukum atas akta jaminan fidusia yang dibuat/didaftarkannya. Akibat hukum PT Tjandra Artha Lestari apabila tidak didaftarkan adalah penerima fidusian akan mengalami kesulitan apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi serta penerima fidusian jadi tidak memiliki hak untuk mendahului kreditur-kreditur lain dalam hal melakukan pelunasan hutang.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab, Notaris, Fidusia, Bank.*

Abstract

Notary status is regulated in Act Number 2 of 2014 relative to Amendments to Act Number 30 of 2004 (hereinafter referred to as UUNJ). In carrying out its authority, the Notary is obliged to provide investment guarantees and is obliged to fulfill the rights and obligations of the parties in economic cooperation and other matters needed. This study uses a normative legal approach, which uses secondary data as primary data, consisting of primary, secondary and tertiary legal material. This study aims to analyze the authority and responsibility of a notary public in issuing fiduciary deeds to banks and their legal consequences if a fiduciary guarantee is made by the notary is not registered at the fiduciary registration office.

The results of the research and discussion resulted that a notary must be very careful in carrying out all his duties and authority over the rights and obligations of the parties and in the results of this study also showed that the role and responsibilities of the notary public in making a fiduciary deed at the bank financial institution because it was legal liability, namely the guarantee of legal certainty over a fiduciary deed made / registered. The legal consequence of PT Tjandra Artha Lestari if it is not registered is that the fidusian recipient will experience difficulties if the fiduciary provider defaults and the fidusian recipient does not have the right to overtake other creditors in terms of paying off debts.

Keywords: *Responsibility, Notary, Fiduciary, Bank.*

Cara Mengutip (*How to Cite*): Oddy Marsa JP, “Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia pada Bank Perkreditan Rakyat (Suatu Studi pada Bank Tjandra Artha Lestari Bandar Lampung)”, *Jurnal Cepalo*, 3 (1), (2019): 19-26.

DOI: <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1786>

A. Pendahuluan

Notaris merupakan pejabat publik yang berperan dalam membuat akta otentik. Salah satu hal untuk mencapai tujuan hukum adalah dengan kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud yaitu keharusan untuk jaminan investasi dan jaminan kepastian dalam suatu kontrak untuk memenuhi kewajiban dan hak-hak para pihak yang bersangkutan dalam suatu kontrak tersebut. Dalam hal ini, penulis mencoba untuk menggali lebih dalam peran notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia, menimbang bahwa sertifikat fidusia tersebut adalah jaminan Hak kreditur (Bank/Finance/Usaha Jasa Keuangan) dalam memberikan produk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Bank Perkreditan Rakyat Tjandra Artha Lestari (selanjutnya disebut BPR Tjandra Artha Lestari) adalah salah satu Perseroan Terbatas yang memiliki Usaha Jasa Keuangan dalam hal ini mengeluarkan produk fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor yang membutuhkan peran Notaris dalam memberikan kepastian hukum atas setiap perikatan yang dilakukan oleh BPR Tjandra Artha Lestari. Dalam prakteknya, BPR Tjandra Artha Lestari, dalam melaksanakan usahanya tersebut, selalu mengalami kendala dalam mendaftarkan produk pembiayaannya untuk mendapatkan sertifikat fidusia, kendala tersebut sebenarnya hanya terkait dengan waktu dan syarat formalitas lain, sehingga Notaris tersebut bukan hanya membuat akta perikatan jual beli, tetapi juga harus mendapatkan sertifikat jaminan fidusia yang didaftarkan melalui Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Dalam pasal 1 ayat (1) UUJN, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Maka dari itu sehubungan dengan hal tersebut, Notaris harus memiliki pertanggungjawaban atas pekerjaannya dalam membuat akta otentik dan kewenangan Notaris lainnya serta harus memiliki kebenaran yang dapat dibuktikan dan di pertanggungjawabkan kepada para pihak. Kewenangan Notaris yang diatur dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) UUJN, yaitu:

Ayat (1): Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Ayat (2): Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. Membuat *copy* dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
6. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. Membuat Akta risalah lelang.

Dalam perkembangannya di Indonesia, sering sekali terjadi ketidakseimbangan antara praktek dengan teori, dikarenakan terkadang perangkat hukum yang ada di Indonesia belum mampu untuk mengikuti perkembangan-perkembangan hukum yang baru, hal ini dapat dilihat dari praktek notaris dan pejabat umum pembuat akta tanah (PPAT) dalam hal pembuatan akta-akta otentik.¹ Notaris memiliki peran yang besar dalam kehidupan masyarakat salah satunya dalam hal transaksi bisnis dan beberapa ketentuan lainnya juga mengharuskan dibuat dengan akta Notaris supaya memiliki kekuatan hukum sesuai dengan Pasal 15 ayat (1)

¹ Sudikno Mertokusumo, “Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris”, *Renvoi*, No. 12, (2004), hlm. 493.

UUJN. Kewenangan yang dimiliki oleh notaris merupakan kewenangan atribusi, yaitu Notaris dalam hal menggunakan wewenangnya memiliki tanggung jawab penuh terhadap akibat-akibat hukum yang akan timbul atas tindakan/kewenangan notaris tersebut.

Salah satu syarat untuk mendaftarkan jaminan fidusia adalah penerima fidusia berkewajiban untuk melakukan pengenaan benda (bergerak) dengan akta jaminan fidusia yang harus dilakukan dengan Notaris. Jaminan Fidusia ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UUJF). Namun, kenyataannya adalah bahwa sebagian besar penerima fidusia tidak melakukan akta jaminan fidusia dan, akibatnya, objek dengan jaminan fidusia tidak dapat didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan juga dapat menimbulkan jaminan fidusia jika debitur melanggar kreditor. Dalam Pasal 37 UUJF, kreditor tidak memiliki hak untuk memiliki prioritas di dalam atau di luar likuidasi atau kebangkrutan.

Untuk menjamin keamanan hukum, kreditor wajib mendaftarkan akta yang dibuat oleh notaris dan kemudian mendaftar ke Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan setelah itu kreditor akan mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Pada awalnya, perjanjian fidusia disusun dalam bentuk akta di bawah tangan dan akta notaris. Namun, setelah dikeluarkannya UUJF, objek yang dikumpulkan sebagai objek Jaminan Fidusia, dalam pasal 5 ayat (1) UUJF, harus dilakukan dengan akta notaris dan di Indonesia dengan jaminan fidusia. Penggunaan jaminan fidusia oleh BPR, karena jaminan fidusia adalah cara untuk memberikan perlindungan hukum untuk keamanan bank, sehingga pelanggan debitur akan membayar pinjaman kredit mereka.²

Dalam melaksanakan tugasnya, notaris tunduk pada peraturan hukum dan juga kode etik profesi. Kode etik profesi notaris menjelaskan bahwa, seorang notaris harus bertindak, adil, jujur, tidak memihak dan harus melindungi kepentingan para pihak, dan notaris harus melakukan tindakan hukum yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang telah berlaku.³ Berdasarkan uraian latar belakang, masalah investigasi ini berfokus pada peran dan juga tanggung jawab notaris dalam penerbitan akta fidusia kepada bank dan konsekuensi hukumnya jika jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris tidak terdaftar di kantor pendaftaran fidusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normative, yang menggunakan data sekunder sebagai data utama, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam penerbitan akta fidusia kepada bank dan konsekuensi hukumnya jika jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris tidak terdaftar di kantor pendaftaran fidusia.

B. Pembahasan

1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pada Lembaga Keuangan Bank

Peran notaris adalah wajib memberikan layanan terbaik dan paling adil kepada publik yang membutuhkan layanan notaris, dan notaris juga harus memberikan layanan kepada masyarakat yang berbasis di Pancasila, mematuhi hukum, mematuhi kewajiban sesuai dengan hukum, kode etik profesional. Dengan legislasi dan juga sesuai dengan Hukum Jabatan Notaris (UUJN). Selaras dengan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, mengenai semua perjanjian/kontrak, perbuatan serta penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum. Notaris juga merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dalam rangka untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat atau pihak yang membutuhkan akta jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain.

Aturan yang terkandung dalam Hukum Posisi Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kode Etik Notaris dan peraturan hukum umum lainnya adalah wajib bagi notaris, notaris harus mematuhi dan mematuhi peraturan. berlaku Tanggung jawab yang melekat dalam notaris dimulai dari saat sumpah diambil sampai notaris menarik pada usia yang ditentukan dalam Peraturan posisi notaris (Stb. 1860-3) atau sekarang telah diubah menjadi Hukum posisi notaris. Hans Kelsen juga menyebutkan dalam teori hukum tentang tanggung jawab hukum bahwa konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum, sehingga saling terkait dan juga harus bertanggung jawab atas hukum untuk tindakan tertentu. Harus bertanggung jawab atas penalti dalam hal melakukan tindakan yang

² Gunawan Buntarman, *Hukum Jaminan Fidusia*, Bandung: Erresco, (2004), hlm. 74.

³ Wawan Setiawan, *Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Media Notariat, Edisi Mei dan Juni 2004.

bertentangan.⁴ Dalam teori tanggung jawab hukum, perlu juga untuk memberikan penjelasan antara tanggung jawab notaris dan kewajiban / wewenang notaris berdasarkan UU Jabatan Notaris (UUJN). Salah satu pihak berwenang menciptakan bukti hukum yang dapat dipertanggungjawabkan oleh para pihak dan mungkin juga bertanggung jawab secara pidana.

Menurut Evi Udin,⁵ bahwa saat menghadapi hambatan atau kesulitan yang terjadi dalam praktek, notaris harus melakukan konsultasi dengan pihak/ instansi yang berwenang, serta menyarankan untuk dimasukkannya klausula-klausula dalam aktanya yang bertujuan untuk melindungi para pihak yang melakukan kontrak/perjanjian. Ini dilakukan karena notaris tidak hanya bertanggung jawab secara hukum, tetapi juga notaris akan dimintai tanggung jawab moralnya. Meskipun notaris diklasifikasikan sebagai pejabat publik, itu tidak berarti bahwa notaris sama dengan pejabat publik di bidang pemerintahan yang diklasifikasikan sebagai agen administrasi negara, karena keduanya memiliki produk yang berbeda dari masing-masing pejabat publik. Notaris menghasilkan produk, yaitu, fakta otentik yang tunduk pada hukum perdata. Penulisan yang dilakukan oleh notaris tidak menghasilkan hukum perdata untuk seseorang atau badan hukum sipil, dan akta tidak memenuhi persyaratan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual, konkret dan final.

Berdasarkan hasil wawancara dengan FX Sumarja,⁶ telah diketahui bahwa notaris sebagai pejabat publik diatur oleh aturan-aturan yang bersifat hukum dan bertujuan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan jasanya dalam membuat alat bukti tertulis yang bersifat otentik dan berkaitan dengan peristiwa/perbuatan yang berhubungan dengan hukum. Maka dari itu, seorang notaris haruslah memiliki semangat yang tinggi dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang memerlukan jasanya, dan apabila masyarakat tersebut merasa puas akan kinerja notaris yang telah melaksanakan tugas/jabatannya dengan baik, maka masyarakat wajib memberikan honorarium kepada notaris. Dalam pasal 1868 KUHPerdata, menyebutkan bahwa Akta Otentik adalah: "Akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai yang berkuasa/pegawai umum untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya." Dapat dikatakan bahwa ketentuan akta otentik adalah asli jika:

- a. Perbuatan tersebut dilakukan oleh pegawai negeri yang ditunjuk oleh hukum.
- b. Bentuk penulisan dan cara melakukannya harus dipandu oleh ketentuan yang ditentukan oleh hukum.
- c. Akta otentik memiliki makna yang jauh lebih penting daripada bukti, yaitu, jika terjadi perselisihan, akta otentik dapat berguna sebagai panduan bagi pihak yang bersengketa.

Peran seorang notaris sebagai pejabat publik yang memiliki wewenang untuk melakukan tindakan otentik sangat penting bagi kehidupan orang, karena banyak sektor kehidupan masyarakat memerlukan partisipasi notaris dan karena notaris memiliki kekuatan hukum untuk melakukan tindakan hukum. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa, Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kemudian, dari situ, Notaris dapat membuat alat verifikasi legal dan absolut karena disahkan oleh hukum, yang mutlak dan dianggap benar. Hal-hal ini sangat penting bagi pihak-pihak yang membutuhkan bukti untuk bukti pribadi dan minat dalam kegiatan komersial, kepentingan usaha, dan lain-lain.

Jika akta salah yang dibuat oleh notaris tidak dapat dibuktikan, maka akta tersebut adalah akta otentik yang telah diperoleh dari saksi yang dapat dipertanggungjawabkan dan didukung oleh dokumen hukum atau hukum sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Seperti dijelaskan dalam Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan didalam undang-undang maka tidak akan dipidana, sepanjang tugas/wewenang tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Susan Riana perkembangan peran jabatan notaris sangat penting khususnya dalam dunia perbankan. Karena notaris memiliki peran dalam pembuatan akta-akta jaminan dalam dunia perbankan, dan notaris adalah salah satu elemen penting dalam setiap transaksi perbankan operasional. Dalam praktiknya, bank hanya perlu jaminan untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa pembiayaan yang diberikan oleh klien dapat dipulihkan. Salah satunya yaitu jaminan fidusia, jaminan fidusia ialah jaminan yang berupa pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak

⁴ Hans Kelsen, (Alih Bahasa Oleh Somardi), *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia, (2007), hlm 81.

⁵ Berdasarkan Wawancara Evi Udin selaku Notaris di Bandar Lampung Tanggal 22 Mei 2017.

⁶ Berdasarkan Wawancara FX Sumarja selaku Majelis Pengawas Notaris Kota Bandar Lampung pada tanggal 24 Mei 2017.

kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) menyebutkan bahwa:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Unsur-unsur fidusia itu sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Pengalihan hak properti ke suatu objek.
- b. Dibuat atas dasar kepercayaan.
- c. Benda tetap dalam kepemilikan pemilik objek.

Intinya adalah bahwa fidusia adalah pengalihan dan penyerahan kepemilikan suatu objek, asalkan objek hak milik harus diberikan kepada penerima fidusia untuk tetap dalam kendali pemilik objek.

Menurut Susan Riana menambahkan bahwa fokus perhatian dalam hal jaminan fidusia adalah jika debitur gagal mematuhi. Dalam hukum perjanjian, jika debitur melanggar perjanjian atau tidak mempertahankan konten kontrak yang telah disepakati, dianggap bahwa debitur telah melanggar. Dalam praktik perbankan secara umum, kontrak kredit dibuat dengan sertifikat di tangan karena meminimalkan atau mengoptimalkan waktu dan memfasilitasi debitur yang akan mengambil kredit dengan cepat tanpa harus menunggu akta yang dibuat oleh notaris dan menyimpan uang / biaya untuk membuat sertifikat dalam kredit. Khusus untuk bank yang menjamin jaminan objek, notaris membuat sertifikat jaminan jika jaminan tersebut fidusia. Perjanjian kredit yang dibuat dengan jaminan fidusia bukan jaminan yang berasal dari hukum, tetapi muncul karena ada kebutuhan untuk kontrak antara bank sebagai kreditor dan pelanggan sebagai debitor. Oleh karena itu, dalam perjanjian hukum, jaminan fidusia lebih khas / khusus dibandingkan dengan jaminan yang muncul berdasarkan hukum yang telah diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata. Fungsi hukum dari mengikat objek fidusia dalam akta jaminan fidusia tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kredit.

Jika debitor sebagai pemberi fidusia melakukan wanprestasi maka upaya terakhir yang dapat dilakukan kreditor sebagai penerima fidusia adalah dengan melakukan eksekusi jaminan fidusia. Bentuk dari pelanggaran (wanprestasi) yang dimaksud yaitu tidak terlaksananya kewajiban-kewajiban (prestasi) yang seharusnya dilakukan baik dari perjanjian fidusia, perjanjian pokok, dan perjanjian jaminan lainnya. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia telah terdapat batas ruang lingkup untuk fidusia, yaitu berlaku pada setiap kontrak yang bermaksud untuk membebaskan benda yang menggunakan jaminan fidusia. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah salah satu badan yang memberikan kredit untuk masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menjelaskan bahwa BPR merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan berlandaskan prinsip syariah yang dalam aktivitasnya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. PT BPR Tjandra Artha Lestari adalah salah satu BPR di provinsi Lampung yang kegiatannya mengumpulkan dan menyalurkan dana untuk mendapatkan keuntungan. Menurut wawancara dengan Susan Riana sebagai Direktur Utama PT. BPR Tjandra Artha Lestari yang memberikan kredit setiap saat, PT. BPR Tjandra Artha Lestari selalu meminta jaminan dari kreditor. Suatu bentuk jaminan yang digunakan oleh PT. BPR Tjandra Artha Lestari adalah jaminan fidusia. Perjanjian fidusia dinyatakan dalam akta notaris yang disebut akta jaminan fidusia. Penegasan bentuk perjanjian jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dan oleh produsen hukum fidusia harus dianggap sebagai norma hukum yang imperial, dijelaskan dalam Pasal 37 Ayat 3, hukum jaminan fidusia, jika perjanjian Jaminan fidusia dilakukan dalam bentuk akta notaris. Kemudian, secara yuridis, perjanjian jaminan fidusia bukanlah jaminan hak atas materi. Jika terkait dengan proses jaminan fidusia saat mendaftar dengan Kantor Pendaftaran Fidusia, hal-hal di atas dapat dilihat dengan jelas, terutama karena permintaan pendaftaran jaminan fidusia harus dilengkapi dengan salinan akta notaris yang berkaitan dengan pengenaan jaminan fidusia tersebut. jaminan fidusia. Dari sini, Anda dapat merasakan peran penting seorang notaris untuk keamanan hukum dan perlindungan kepentingan para pihak.

2. Akibat Hukum Apabila Jaminan Fidusia yang Dibuat oleh Notaris Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Definisi yang didasarkan pada konsekuensi hukum adalah hasil dari tindakan untuk mendapatkan efek yang dibuat oleh penulis dan diawasi oleh hukum. Tindakan yang diambil adalah tindakan hukum yang merupakan tindakan yang diambil untuk mendapatkan efek yang diinginkan oleh hukum. Untuk menjelaskan pengertian akibat hukum apa yang menjadi permasalahan pada lembaga keuangan bank terlebih dahulu menjelaskan peran bank itu sendiri. Dalam kehidupan masyarakat Bank memiliki peranan yang sangat penting dan berguna sebagai lembaga keuangan. Salah satu peran Bank dalam melakukan aktivitasnya

sebagai lembaga keuangan ialah memberikan kredit. Bank memberikan kredit kepada nasabah dengan berlandaskan atas kepercayaan. Hal ini dilakukan oleh Bank dengan tujuan agar bank memperoleh keuntungan dari klien, dan dengan cara ini bank dapat mengirim simpanan publik kepada klien dalam bentuk kredit, dan jika bank percaya bahwa klien / debitur akan membayar kembali pinjaman sesuai dengan syarat dan tenggat waktu disepakati. dan telah disetujui oleh bank. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan akan jasa- jasa perbankan bagi masyarakat pean, munculnya BPR di Indonesia terasa penting dan semakin berguna serta sangat dibutuhkan. Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1988 dan Nomor 1238/KMK.00/1989 Tanggal 14 November 1989, menetapkan perubahan-perubahan mendasar tentang BPR. Perubahan-perubahan yang dimaksud mencakup status kegiatan usaha serta tata cara pendirian BPR.

Berdasarkan wawancara dengan Susan Riana sebagai Direktur Jenderal PT. BPR Tjandra Artha Lestari mengatakan bahwa salah satu bank yang perusahaannya mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan masyarakat dalam bentuk kredit untuk meningkatkan kehidupan masyarakat pada umumnya. Dia menjelaskan bahwa PT. BPR Tjandra Artha Lestari sangat memahami bahwa kesuksesan dan ketahanan suatu perusahaan sangat ditentukan oleh sistem yang baik dan struktur organisasi. Memfasilitasi tujuan yang ingin dicapai oleh PT. BPR Tjandra Artha Lestari membutuhkan struktur organisasi di mana terdapat beberapa bagian unit kerja, yang masing-masing memiliki tugas yang berbeda. Dalam struktur organisasi perlu untuk memisahkan otoritas dan kewajiban masing-masing pihak. Sementara ketika mengajukan pinjaman, suatu perjanjian pinjaman tentu dibuat untuk BPR karena antara pemberi fidusia atau debitur dan penerima atau kreditor fidusia yang menandatangani perjanjian kredit mengikat atau mengikat dari jaminan fidusia di hadapan notaris. Perjanjian tersebut mengikat (Pacta Sunt Servanda) dan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian. Selain itu, ada kesepakatan untuk mentransfer hak properti dari suatu objek berdasarkan kepercayaan asalkan objek yang hak kepemilikannya ditransfer tetap menjadi milik pemilik objek. Jaminan fidusia dapat dikatakan sebagai teori jaminan karena berisi bahwa penerima fidusia dan penerima fidusia membuat perjanjian hanya berdasarkan kepercayaan, dan fidusia memberikan hak properti kepada penerima fidusia, tetapi penerima fidusia tidak memiliki objek yang langsung menjamin fidusia. Diserahkan oleh donor fidusia. Jaminan fidusia yang terkait dengan teori jaminan sebelumnya juga dipandu oleh sistem hukum. Sistem hukum adalah tatanan hukum lengkap yang didukung oleh serangkaian prinsip jaminan hukum yang terdiri dari beberapa prinsip.

Tata cara untuk melakukan registrasi jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000. Pengregistrasian fidusia tidak bisa dipisahkan dari jaminan fidusia karena pengregistrasian fidusia dapat membuat kepastian hukum terjamin bagi kreditur dan pihak lain yang bersangkutan. Masalah dalam pendaftaran fidusia sangat mendasar karena pihak yang berkepentingan tidak secara sengaja mendaftarkan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Ini dapat dianggap sebagai masalah mendasar karena peran Wali Amanat sangat lemah, dan jika pengenalan objek fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia tidak dilakukan oleh notaris karena niatnya, atau kerjasama antara donor/pemberi fidusia dan penerima fidusia. dan tidak membebaskan biaya objek jaminan fidusia atau pendaftaran jaminan fidusia.

Jika pihak ke tiga melakukan sewa terhadap objek jaminan fidusia, maka pihak ketiga juga harus mendapatkan perlindungan dari pemberi fidusia dan penerima fidusia. Kewajiban pembebanan, pengregistrasian, serta ancaman atau sanksi akibat kelalaian para pihak yang bersangkutan tidak membebani objek jaminan fidusia dan tidak merigstrasi jaminan fidusia tersebut telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Bagi para pihak yang bersangkutan yang telah membuat perjanjian kredit atau perjanjian pengikatan jaminan fidusia ataupun terhadap pihak ketiga mereka akan mendapat kepastian hukum dan keadilan hukum yang sebagaimana telah ditegaskan didalam undang-undang, jika debitur atau pemberi fidusia melakukan pelanggaran terhadap hutangnya. Menurut Amru Walid Batu Bara bahwa pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memang telah meluncurkan sistem fidusia online pada 5 Maret 2013, sebelum diluncurkannya sistem fidusia online, pengregistrasian fidusia dibuat dengan cara manual. Lembaga yang mendaftarkan jaminan fidusia, yaitu, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Publik Kemenkumham, melanjutkan sistem fidusia online dengan menerbitkan Surat Edaran dari Direktur Jenderal AHU No. AHU-06.OT 0,03,01 2013, yang mengacu pada pengumuman sistem administrasi untuk pendaftaran jaminan fidusia elektronik (sistem online).

Berdasarkan Surat Edaran dari Direktur Jenderal AHU, mekanisme untuk mendaftarkan jaminan fidusia online adalah mekanisme berdasarkan pasal 14, paragraf 1, dan pasal 16, paragraf 2, dari Undang-Undang

Jaminan Fidusia. Selain itu, aplikasi untuk pendaftaran jaminan fidusia akan digunakan sebagai dasar untuk sertifikat jaminan fidusia. Saat membuat akta fidusia, tarif akan dibebankan sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Biaya yang telah ditentukan tercantum dalam Lampiran PP No. 38 tahun 2009 tentang jenis dan tarif dari jenis pendapatan negara bukan pajak yang berlaku untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, penerima jaminan fidusia akan menerima daftar fidusia manual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang terletak di ibukota Jakarta. Selanjutnya, permintaan tersebut ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Trust Fiduciary Register Office di tempat asal donor fidusia secara tertulis dan dalam penggunaan bahasa Indonesia oleh penerima fidusia, perwakilannya, mendeklarasikan Deklarasi Pendaftaran Jaminan Perwalian dan melengkapi formulir dan konten yang ditentukan dalam Lampiran I Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor M-01.UM.01.06 dari 2000, yang berisi:

PT BPR Tjandra Artha Lestari melakukan pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Yang memiliki mandat dalam hal ini maksudnya adalah Kantor Pendaftaran Fidusia yang berlokasi di Lampung, yaitu di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kota Bandar Lampung. Pihak PT BPR Tjandra Artha Lestari tidak dengan langsung melakukan pengregistrasian jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran, akan tetapi mengupayakan dilakukannya pengregistrasian jaminan fidusia tersebut kepada notaris yang telah di pilih oleh pihak bank. Hal tersebut adalah merupakan legal dan tercantum dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia.

Sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, setelah permohonan pendaftaran jaminan fidusia dan telah diterima oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, kantor pendaftaran fidusia akan mendaftarkan jaminan yang telah didaftarkan. atau terdaftar di Buku Pendaftaran Fidusia. Selain itu, pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya permohonan fidusia. Kantor pendaftaran fidusia mengeluarkan dan memberikan Sertifikat jaminan fidusia kepada penerima fidusia pada tanggal yang sama dengan saat permintaan pendaftaran jaminan fidusia diterima. Kemudian jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama. Ketentuan- ketentuan ini diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Sebagai kekuatan keamanan dan penegakan hukum dari jaminan yang telah dimasukkan dalam Pasal 14, ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, sertifikat jaminan fidusia mempunyai *title eksekutorial* “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan adanya *title eksekutorial* tersebut, sertifikat jaminan fidusia jadi memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan keputusan pengadilan yang bersifat mutlak. Dengan hadirnya *title eksekutorial* tersebut dalam sertifikat jaminan fidusia, maka hal tersebut dapat memberikan PT BPR Tjandra Artha Lestari hak untuk melelang objek yang menjadi objek jaminan fidusia melalui aktivitas lelang jika seandainya debitur gagal mematuhi. Oleh karena itu, pelaksanaan jaminan fidusia telah diatur secara ketat dan spesifik dalam Undang- Undang Jaminan Fidusia dan ketentuan ini dilakukan melalui sistem *pranata parate* eksekusi.

Menurut Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, menjelaskan bahwa penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya dan Pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia meneruskan bahwasannya jika atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia lebih dari 1 (satu) Perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang sudah lebih dahulu mendaftarkannya ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Inti dari pasal diatas adalah jaminan fidusia yang tidak terdaftar tidak memiliki hak preferensial atau hak prioritas baik di dalam maupun di luar kebangkrutan atau likuidasi.

Perjanjian jaminan fidusia dapat berupa individu atau individu (karakter *persoonlijke*) ini terjadi jika jaminan fidusia tidak terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia. Konsekuensi hukum berikut adalah bahwa penerima fidusia akan mengalami kesulitan untuk mengeksekusi jika debitur atau fidusia melanggar atau melanggar, dan ini juga telah dijelaskan dalam undang- undang fidusia, bahwa jika debitur atau fidusia melanggar atau gagal untuk memenuhi objek yang menjadi objek jaminan Wali amanat dapat dieksekusi dengan mengeksekusi gelar eksekutif. Akta notaris yang dibuat tanpa registrasi sebelumnya tidak memberikan hak preferensi kepada penerima fidusia, juga tidak ada perjanjian yang jelas dan eksplisit dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia sehubungan dengan siapa yang harus melaksanakan jaminan fidusia, bahkan jika jaminan fidusia adalah objek yang perpindahannya beresiko, dan pada akhirnya penerima fidusia saat melakukan penerapan di lokasi akan mengalami kejangalan dalam melaksanakan asas *droit de suite*. Selain itu, kekurangan di atas semakin diperburuk oleh praktik penerapan perjanjian fidusia di lapangan, yaitu dengan tidak mendaftarkan objek fidusia (yang tujuannya direalisasikan tetapi dihentikan hanya sampai penulisan otentik), negosiasi yang menghasilkan biaya tambahan karena ketika mengeksekusi objek fidusia,

dan sebaliknya membuat sertifikat fidusia bukan contoh yang baik dari pendidikan hukum untuk masyarakat umum.

C. Penutup

Notaris memiliki peran dan tanggung jawab yaitu jaminan kepastian hukum atas jaminan fidusia yang dibuatnya dan didaftarkan, bergantung pada pendelegasian kewenangan pada kehendak dan kebutuhan dan BPR Tjandra Artha Lestari selaku pengguna manfaat dari notaris, sehingga akta tersebut memiliki alat bukti yang kuat dengan arti kekuatan hukumnya setara dengan keputusan pengadilan yang dimana keputusan pengadilan sudah pasti memiliki kekuatan hukum yang mutlak. Jika debitur melakukan pelanggaran atau wanprestasi dari pelaksanaan pemberi dan penerima fidusia maka dapat dilakukan tanpa mengacu pada putusan pengadilan. Jika jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris pelimpahan kewenangan untuk melakukan pendaftaran fidusia dari BPR Tjandra Artha Lestari namun tidak dilakukannya registrasi ke Kantor Pendaftaran Fidusia akibat hukumnya yaitu penerima fidusia tidak memiliki hak *preferent* atau hak mendahului dari kreditur-kreditur lain sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam hal pelunasan hutang serta penerima fidusia akan mendapatkan kesulitan untuk mengeksekusi jika debitur/pemberi fidusia melakukan pelanggaran atau wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Buntarman, Gunawan. (2004). *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung: Erresco.

Kelsen, Hans. (2007). *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia.

Soeroso. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal dan Artikel

Sudikno Mertokusumo, "Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris", *Renvoi*, No. 12, (2004).

Wawan Setiawan, *Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Media Notariat, Edisi Mei dan Juni 2004.

C. Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

D. Sumber Lainnya

Wawancara Evi Udin selaku Notaris di Bandar Lampung Tanggal 22 Mei 2017.

Wawancara FX Sumarja Selaku Majelis Pengawas Notaris Kota Bandar Lampung pada tanggal 24 Mei 2017.